

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN  
ANGKUTAN BARANG DI JALAN KABUPATEN**

**(Studi di Kabupaten Langkat)**

**TESIS**

OLEH

**HARIMIN TARIGAN  
NPM. 151803032**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan  
Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten  
Langkat)**

**Nama : Harimin Tarigan**

**NPM : 151803032**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum**

  
**Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS**

**Telah diuji pada Tanggal 29 Mei 2017**

---

---

**N a m a : Harimin Tarigan**

**N P M : 151803032**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., MH**

**Pembimbing II : Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS**

**Penguji Tamu : Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

METERAI  
TEMPEL

0C659AEF335182473

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



Medan, Mei 2017

**Harimin Tarigan**

## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN KABUPATEN (STUDI DI KABUPATEN LANGKAT)

**N a m a** : Harimin Tarigan  
**N P M** : 151803032  
**Program** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, M.Hum

Pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten mengakibatkan kerusakan permukaan jalan, kendaraan dan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang, penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *sosiolegal* menggunakan metode kombinasi antara penelitian *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* yang bersifat *deskriptif* dan berbentuk *preskriptif*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan guna mendapatkan data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Setelah dilakukan analisis data diketahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten : 1) substansi hukum, perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan belum mengatur secara jelas tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten; 2) struktur hukum, rendahnya kuantitas dan kualitas penegak hukum serta sarana dan fasilitas penegakan hukum; 3) budaya hukum, masih rendahnya motivasi kerja, komitmen dan integritas moral penegak hukum serta kepatuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan muatan angkutan barang. Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten secara preemtif atau pendidikan berlalu-lintas, preventif atau pencegahan dan represif atau menggunakan sarana pidana. Sebagai saran yang disampaikan adalah : 1) penyempurnaan undang-undang; 2) peningkatan kuantitas dan kualitas penegak hukum dan sarana/fasilitas penegakan hukum; 3) meningkatkan budaya hukum penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat serta perlunya dukungan dan kerjasama antara Pemerintah, pemangku kepentingan dan penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

Kata kunci : penegakan hukum, pelanggaran muatan angkutan barang, jalan kabupaten.

## **ABSTRACT**

*The violation regulation of the charge transport of goods on the road of district causes the damage of road surface, vehicle and environmental pollution. This research aims to analyze the factors that cause the violation regulation of the charge transport of goods, to see the implementation of traffic and transportation laws which regulate the rule of the charge transport of goods and to review the exertions that can be done in law enforcement to the violation regulation of the charge transport of goods on the road of district. This research is the research of sociolegal law using the combination of normative juridical and empirical juridical method which having descriptive characteristic and perspective form. The data collection was done by using the literature study and the field study to get the secondary and primary data. The data analysis was done by using qualitative analyze technique. After analyzing the data, noted that the factors of the violation regulation of the charge transport of goods on the road of district: 1) the law substance, the legislation of traffic and transportation has not clearly organized the system of punishment for the offender of the violation regulation of the charge transport of goods on the road of district; 2) the law structure, the low quality and quantity of law upholder and also the low quality and quantity of law enforcement's tools and facilities; 3) the law culture, the low level of work motivation, low commitment and low moral integrity of law upholder, along with the public's obedience and knowledge about the determinate regulation of the charge transport of goods. The implementation of laws which controls the certain regulation of the charge transport of goods on the road of district is not done optimally by the inhabitants, the law culture of society and law upholder. The exertions that can be done as the law enforcement of the regulation of the charge transport of goods on the road of district are in preemptive way or using punishment, in preventive way and repressive way or using punishment tools. As the advice : 1) consummation of legislation; 2) an increase in the quantity and quality of law enforcement and facility/facilities of law enforcement; 3) improve the legal culture of law enforcement and awareness of community law as well as a need of support and cooperation between the government, stakeholder and the law upholder in improving the effectiveness of laws toward the violation regulation of the charge transport of goods on the road of district.*

*Keyword : law enforcement, the violation regulation of the charge transport of goods, the road of district.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN KABUPATEN (Studi Di Kabupaten Langkat)"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS.
5. Dosen Program Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
7. Ayah Alm. K Tarigan dan Ibunda R Br Bangun, serta isteri dr. Yunita Bangun, ananda Ais, Putri dan Siva.
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2015.
9. Seluruh staf/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Mei 2017

**P e n u l i s**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
LAMPIRAN .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian .....	11
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1.6.1. Kerangka Teori .....	12
1.6.2. Kerangka Konsep .....	24
1.7 Metode Penelitian.....	27
1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
1.7.2. Tipe Penelitian.....	28
1.7.3. Data dan Sumber Data.....	30
1.7.4. Metode Pendekatan .....	31
1.7.5. Alat Pengumpul Data .....	31
1.7.6. Analisis Data .....	33
1.8 Sistematika Penulisan.....	34

### **BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN KABUPATEN**

2.1. Substansi Hukum.....	35
2.2. Struktur Hukum .....	55
2.3. Budaya Hukum .....	69
2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Muatan di Jalan Kabupaten .....	79



<b>BAB III PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG MENGATUR KETENTUAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN KABUPATEN</b>	
3.1. Penerapan Oleh Masyarakat dan Budaya Hukum .....	82
3.2. Penerapan Undang Undang .....	90
3.3. Penerapan Oleh Penegak Hukum .....	106
3.4. Penerapan Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum .....	108
<b>BAB IV UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN KABUPATEN</b>	
4.1. Upaya Preemptif.....	121
4.2. Upaya Preventif .....	121
4.3. Upaya Represif.....	135
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	143
5.2. Saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>149</b>

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Kerusakan Permukaan Jalan Kabupaten Langkat Tahun 2011 – 2014 .....	1
Tabel 1.2. Jumlah Surat Tilang Muatan Angkutan Barang Yang Diterbitkan PPNS LLAJ Kabupaten Langkat Tahun 2013 s.d. 2016.....	2
Tabel 2.1. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Bulan Januari 2017 .....	59
Tabel 2.2. Sarana dan Fasilitas Pengawasan Muatan Angkutan Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Tahun 2016 .....	60
Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia PPNS LLAJ Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat .....	66
Tabel 3.1. Kebutuhan SDM Dalam Satu Grup/Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Kabupaten .....	111

## DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
1. Daftar Pertanyaan Kuesioner.....	158
2. Peta Kabupaten Langkat.....	162



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kondisi permukaan jalan kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara banyak mengalami kerusakan akibat kelebihan muatan angkutan barang,<sup>1</sup> hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan media massa, diantaranya adalah kerusakan jalan Kabupaten Langkat yang diakibatkan melintasnya ratusan truk kendaraan bermotor setiap hari bermuatan material tanah, pasir dan batu.<sup>2</sup> Pemberitaan kerusakan jalan kabupaten di media massa sejalan dengan data statistik dari tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan rata-rata 51,61 persen kerusakan permukaan jalan di Kabupaten Langkat.

Tabel 1.1. Kerusakan Permukaan Jalan Kabupaten Langkat Tahun 2011 - 2015

No.	Tahun	Panjang Ruas Jalan (km)	Permukaan Jalan yang Rusak (%)
1.	2011	1.412,84	59,41
2.	2012	1.412,84	50,48
3.	2013	1.421,33	48,82
4.	2014	1.561,19	48,80
5.	2015	1.561,27	50,69
Rata-Rata			51,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat Tahun 2016

<sup>1</sup> Menurut Sulaksono (2011) dalam bukunya "*Rekayasa Jalan*", Penerbit ITB, Bandung, secara garis besar kerusakan jalan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kerusakan struktural, mencakup kegagalan perkerasan atau kerusakan dari satu atau lebih komponen perkerasan yang mengakibatkan perkerasan tidak dapat lagi menanggung beban lalu lintas; dan kerusakan fungsional yang mengakibatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu sehingga biaya operasi kendaraan semakin meningkat. Pada umumnya, perkerasan jalan terdiri dari beberapa jenis lapisan perkerasan yang tersusun dari bawah ke atas, sebagai berikut : a) lapisan tanah dasar (*sub grade*); b) lapisan pondasi bawah (*subbase course*); c) lapisan pondasi atas (*base course*); dan d) lapisan permukaan / penutup (*surface course*).

<sup>2</sup> SKH Waspada, "*Belasan Kilometer Jalan Di Langkat Hancur*", Senin, 28 September 2015, hlm. C1

Berdasarkan data dari Tim Pemeriksa Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat kendaraan bermotor angkutan barang yang melanggar ketentuan muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2015 diberikan Surat Bukti Pelanggaran (Tilang) sebanyak 692 unit.

Tabel 1.2. Jumlah Surat Tilang Muatan Angkutan Barang Yang Diterbitkan PPNS LLAJ Kabupaten Langkat Tahun 2013 s.d. 2016

No.	Tahun	Jumlah Surat Tilang yang diterbitkan PPNS LLAJ
1.	2013	231
2.	2014	191
3.	2015	199
4.	Januari s.d. Juni 2016	71

Sumber : Tim Pemeriksa Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Langkat Tahun 2016

Besarnya prosentase jalan yang rusak dan terganggunya kelancaran arus lalu lintas di jalan Kabupaten Langkat menimbulkan keluhan dan protes masyarakat,<sup>3</sup> sehingga menimbulkan konflik antara pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang dengan masyarakat pengguna jalan lainnya diantaranya :

- a. masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, memberhentikan dan melarang kendaraan bermotor yang melebihi muatan melintasi jalan kabupaten;<sup>4</sup>
- b. memasang alat pembatas ketinggian kendaraan (portal) agar kendaraan jenis tertentu tidak melewati jalan kabupaten;<sup>5</sup>
- c. menutup jalan kabupaten dengan benda/peralatan tertentu;<sup>6</sup>

<sup>3</sup> SKH Sinar Indonesia Baru (SIB), "KNPI, OKP dan Ormas se-Wampu Datangi DPRD Langkat, Pertanyakan Peran Wakil Rakyat Terhadap Kerusakan Jalan Akibat Truk Galian C", Senin, 14 September 2015, hlm. 14

<sup>4</sup> Surat Kepala Desa Psr VIII Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Nomor : 470-207/PsrVIII/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal *Penyetopan/Pelarangan Mobil Dam Truk yang tidak sesuai dengan Kapasitas Jalan*

<sup>5</sup> Surat Kepala Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tanggal 12 September 2013

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung
- Arief, Nawawi, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Grup
- Arifin, Zainal, 2012, *Perkembangan Teknologi Kendaraan Bermotor, Bahan Refrensi Pelaksanaan Diklat Penyegaran Pusbang SDM Perhubungan Darat*, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga. Jakarta, Rineka Cipta
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010, *Teoritisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* Surakarta, Muhammadiyah University
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, Sofmedia
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Difa Publisher
- Friedman, M, Lawrence, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*. Diterjemahkan oleh M. Khosim, Bandung, Nusa Media
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Griffin, Ricky W, 2004, *Manajemen*, Edisi Ketujuh, Jilid 1. Jakarta, Erlangga
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metodologi Research II*, Yogyakarta, Andi Offset
- Hamzah, Andi 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Mahmud M.D, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet-6, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta, FH UII Press

Mangkunegara, Prabu, Anwar, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, Penerbit Remaja Rosdakarya

Marzuki, Mahmud, Peter, 2011, *Penelitian Hukum, Cet. 7*, Jakarta, Kencana

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

\_\_\_\_\_ 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Centre

Nasution, S, 1996, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara.

Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jakarta, Media Perkasa

Rahardjo, D.M, 1999, *Intelektual, Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung, Mizan.

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru

\_\_\_\_\_ 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa

\_\_\_\_\_ 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press

\_\_\_\_\_ 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_ 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Salim, HS., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Salim dan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Siagian P, Sondang, 2000, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta, Rineka Cipta

- Sidharta, Arief, B, 2008, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV, Rajawali
- \_\_\_\_\_1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, Jakarta, UI-Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Sulaksono, 2011, *Rekayasa Jalan*, Bandung, Penerbit ITB
- Sulistiyowati Irianto, Jan Michiel, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, Julia Arnscheidt, 2012, *Kajian Sosio Legal*, Edisi Pertama, Denpasar, Pustaka Larasan
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi & Refleks*". Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Utrecht, E/Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, PT. Ichtiar Baru
- Warrasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama
- Winardi, 1996, *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*, Bandung, Tarsito.
- Wursanto, Ig. 1987, *Etika Komunikasi Kantor*, Yogyakarta, Kanisius

### **JURNAL DAN HASIL PENELITIAN**

- Agus Setya Basuki, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Perambahan Hutan Di Indonesia, *Jurnal Pascasarja Hukum UNS Edisi 5 Jan-Juni 2015* [jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/pasca/article/download/663/621](http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/pasca/article/download/663/621) diakses tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 21.20 WIB
- Andrea R. Sumampow, Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas, *Jurnal Lex Crimen Vol.II/No.7/November/2013*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3161>.. diakses 03 Januari 2017 pukul 19.00 WIB



- Dian Novita Sari, Analisa Beban Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan Jalan dan Umur Sisa, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Vol. 2 No. 4 Desember 2014*, [ejournal.unsri.ac.id/index.php/jtsl/article/view/1869/pdf](http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jtsl/article/view/1869/pdf). diakses 03 Januari 2017 pukul 19.30 WIB
- Eko Sopyono dkk, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Jakarta, 2013, [www.bphn.go.id/data/documents/lap\\_ahir\\_kajian\\_junef\\_2013.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/lap_ahir_kajian_junef_2013.pdf)... diakses 03 Januari 2017 pukul 20.00 WIB
- Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda, *Journal Administrasi Negara, 4 (3) 2016: 4648-4660 ISSN 0000-0000*, [ejournal.an.fisip.unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip.unmul.ac.id) © Copyright 2016, [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/).. diakses 03 Januari 2017 pukul 20.25 WIB
- Febrianti Kusumastuti, Upaya Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang, [www.journal.unitas-pdg.ac.id/downloadfilemh.php](http://www.journal.unitas-pdg.ac.id/downloadfilemh.php)... diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 20.30 WIB
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia, *Jurnal EKOSAINS Vol. IV | No. 2 | Juli 2012* download. [portalgaruda.org/article.php?article.php?article=106978&val=4048](http://portalgaruda.org/article.php?article.php?article=106978&val=4048) diakses tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 20.30 WIB
- Munawwaroh, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Perekonomian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi, *Jurnal Kajian Ekonomi, Juli 2013, Vol. II, No.03* download. [portalgaruda.org/article.php?article](http://portalgaruda.org/article.php?article) diakses tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB
- Qamal, Koordinasi Kepolisian Dan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Becak Motor Di Kota Makassar, *Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 1 Thn. 2016*, [ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/download/2153/1078](http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/download/2153/1078).... diakses tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB
- Riawan, Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara, *Jurnal JESP-Vol. 8, No 1 Maret 2016 ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115* diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB

Safrudin, Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014* download. [portalgaruda.org/article.php...](http://portalgaruda.org/article.php...) diakses tanggal 20 Peberuari 2017 pukul 20.00 WIB

Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Awal Dimensi Budaya terhadap Perilaku Menyimpang), [www.mahupiki.com/assets/news](http://www.mahupiki.com/assets/news) diakses tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 20.25 WIB

Wahid Wahyudi dkk, Pengaruh Muatan Lebih Beban Gandar Kendaraan Berat Angkutan Barang Terhadap Peningkatan Oksida Karbon, *Jurnal Transportasi Vol. 13 No. 2 Agustus 2013 : 85-92* download. [portalgaruda.org/article.php?](http://portalgaruda.org/article.php?). diakses 03 Januari 2017 pukul 22.00 WIB

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km 461 / Aj 403 / Phb – 82 Tentang Penataan Kembali Jembatan Timbang Di Jalan Raya

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.727/Aj.307/Drjd/2004 Tanggal : 30 April 2004 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum Di Jalan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat

Keputusan bersama tentang Penerapan Denda Tilang antara Pengadilan Negeri Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat, Polisi Resort Langkat dan Dinas Perhubungan Kabupaten tanggal 15 Nopember 2016 di Aula Wira Satya Polisi Resort Langkat

### **WEBSITE/INTERNET :**

<https://polkam.go.id/announcement/>. diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 20.00 WIB

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/02/20/177775/Pu ngli-Kenapa-Masih-Tetap-Marak> diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 20.10 WIB

[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) › Regional › Sumatera diakses 02 Pebruari 2017 pukul 09.00 WIB

<https://ksemar.wordpress.com/category/lintas-berita/page/74> diakses 02 Pebruari 2017 pukul 10.00 WIB

<http://waspada.co.id/sumut/anggota-dprd-sumut-minta-kapolda-tertibkan-galian-c-di-langkat/> diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 19.00 WIB

<https://www.langkatkab.go.id/page/40/perkebunan> diakses 3 Pebruari 2017 pukul 19.30 WIB

<http://old.langkatkab.go.id/read.php?do=detail&id=1428> diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 20,00 WIB

<http://www.lutfichakim.com/2012/03/meningkatkan-integritas-moral-dan.html> diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 19.30 WIB

<http://distamben.langkatkab.go.id/.../3-file.html> diakses 13 Pebruari 2017 pukul 20.00 WIB

<https://www.langkatkab.go.id/page/23/kecamatan> diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 12.15 WIB

### **WAWANCARA**

Alders Syam Siahaan, SH, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat tanggal 16 Pebruari 2017

Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor

*Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 dan 14 Pebruari 2017*

Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 dan 14 Pebruari 2017*

M. Zuhdi, PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 dan 14 Pebruari 2017*

Menson Septo Putranta, AMd. LLAJ, SE, Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 14 Pebruari 2017*

Pujian Ginting, SH, MH, PPNS LLAJ dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017*

### **SURAT KABAR**

SKH Sinar Indonesia Baru (SIB), “*KNPI, OKP dan Ormas se-Wampu Datangi DPRD Langkat, Pertanyakan Peran Wakil Rakyat Terhadap Kerusakan Jalan Akibat Truk Galian C*”, Senin, 14 September 2015, Hal. 14

SKH Waspada, “*Belasan Kilometer Jalan Di Langkat Hancur*”, Senin, 28 September 2015, Hal. C1

### **SURAT SURAT**

Surat Kepala Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tanggal 12 September 2013

Surat Kepala Desa Psr VIII Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Nomor : 470-207/PsrVIII/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal *Penyetopan/Pelarangan Mobil Dam Truk yang tidak sesuai dengan Kapasitas Jalan*

Surat Camat Selesai Kabupaten Langkat Nomor 332-180/Trantib/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal *Laporan Aksi Unjuk Rasa Warga Kelurahan Pekan Selesai*

Surat Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tanggal 17 September 2015 perihal *Surat Permohonan Masyarakat*. Surat Kepala Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Nomor : 400-401/TG/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal *Mohon Penertiban truk/kendaraan yang Melebihi Tonase*

Surat Pengusaha Angkutan Galian C Kabupaten Langkat tanggal 6 Juli 2015 dan Surat Asosiasi Pengusaha Komoditi Non Komoditi Dan Angkutan Truk Binjai Langkat tanggal 10 Juni 2016 perihal *Protes dan Keberatan Sekaligus Permohonan*

Surat PT. Pertamina Pangkalan Susu Nomor : 077/EP0212/2016-SO tanggal 7 Juni 2016 perihal Permohonan Ijin Melintas Jalan Kabupaten Langkat



## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **RESPONDEN 1**

Nama Responden : ALDERS SYAM SIAHAAN, SH  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

#### **Daftar Pertanyaan :**

Apakah menurut Bapak penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat dapat dikenakan terhadap semua jenis kendaraan bermotor angkutan barang?

### **RESPONDEN 2**

Nama Responden : PUJIAN GINTING, SH, MH  
Jabatan : Sekretaris Dinas dan PPNS LLAJ  
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

#### **Daftar Pertanyaan :**

Apakah menurut Saudara ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditindaklanjuti semuanya?

### **RESPONDEN 3**

Nama Responden : GUNAWAN  
Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan PPNS LLAJ  
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

#### **Daftar Pertanyaan :**

1. Bagaimana tata cara pemeriksaan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus?
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewenangan PPNS LLAJ dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten?
3. Apakah Saudara melihat perbedaan tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan nasional menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan di jalan kabupaten? Jelaskan.
4. Apakah menurut Saudara PPNS LLAJ sudah mematuhi ketentuan menyerahkan berkas pelanggaran beserta barang bukti kepada Pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia?
5. Apakah menurut Saudara kuantitas SDM PPNS LLAJ dan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat telah mencukupi kebutuhan pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten?
6. Apakah menurut Saudara kuantitas dan kualitas peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat telah mencukupi kebutuhan?

7. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
8. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dan PPNS LLAJ dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Langkat dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kabupaten?
9. Apakah ditemukan hambatan-hambatan koordinasi dan komunikasi dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan antara PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian?
10. Bagaimana penjelasan Saudara apabila pengemudi menanyakan prosedur pembayaran denda pelanggaran dan pengambilan barang bukti yang disita PPNS LLAJ?

#### **RESPONDEN 4**

Nama Responden : ELI DANIEL SEMBIRING, S.S.T (TD)  
 Jabatan : PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor  
 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

#### **Daftar Pertanyaan :**

1. Apa tindakan Saudara terhadap pelanggaran daya angkut yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 (empat) sedangkan JBI dalam Buku Uji Berkala dibawah 8.000 kg?
2. Apakah menurut Saudara pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang telah memenuhi ketentuan tata cara pemuatan barang dalam bak terbuka?
3. Apakah menurut Saudara motivasi kerja PPNS LLAJ sudah tinggi dalam menegakkan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan?
4. Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan motivasi kerja PPNS LLAJ?
5. Apakah Saudara menemukan perbedaan hasil pengukuran dimensi kendaraan bermotor disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan data dimensi dalam Buku Uji Berkala?
6. Apakah disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian bekerja sesuai kewenangan masing-masing?
7. Apakah pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kabupaten dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang efektif dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
8. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
9. Apakah Saudara melihat ada diskriminasi atau perbedaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengawasan muatan angkutan barang di jalan nasional menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dengan pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
10. Apa menurut Saudara jalan Kabupaten Langkat telah dipasang rambu-rambu kelas jalan?



11. Apa dampaknya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian apabila jalan Kabupaten Langkat belum dipasang rambu-rambu kelas jalan?

### **RESPONDEN 5**

Nama Responden : M. ZUHDI

Jabatan : PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

#### **Daftar Pertanyaan :**

1. Apa tindakan Saudara terhadap pelanggaran daya angkut yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 (empat) sedangkan JBI dalam Buku Uji Berkala dibawah 8.000 kg?
2. Apakah Saudara pernah bertanya kepada pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang mengapa mereka melakukan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat? Apa jawabannya ?
3. Apakah Saudara pernah menemukan kendaraan bermotor angkutan barang dengan identitas yang sama (kesamaan nomor polisi, pengemudi, jenis kendaraan bermotor dan muatan barang) melakukan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten secara terus-menerus ? Apabila pernah, apakah Saudara menanyakan apa alasan pengemudi terus-menerus melakukan pelanggaran ?
4. Apakah pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang mengetahui ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten ?
5. Apakah menurut Saudara PPNS LLAJ memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya?
6. Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan komitmen PPNS LLAJ?
7. Bagaimana pendapat Saudara apabila PPNS LLAJ tidak memiliki integritas moral yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya?
8. Menurut Saudara bagaimana strategi meningkatkan integritas moral PPNS LLAJ?
9. Bagaimana tata cara pemeriksaan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus?
10. Bagaimana bentuk pelanggaran ketentuan muatan angkutan barang yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor angkutan khusus peti kemas yang Saudara temukan di jalan Kabupaten Langkat?
11. Bagaimana tata cara penindakan oleh PPNS LLAJ terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor angkutan khusus peti kemas?
12. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
13. Apa saja kebutuhan perlengkapan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten?
14. Apakah disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian bekerja sesuai kewenangan masing-masing?

15. Apa saja hambatan yang Saudara temukan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kabupaten?

**RESPONDEN 6**

Nama Responden : MENSION SEPTO PUTRANTA, AMd. LLAJ, SE  
Jabatan : Penguji Kendaraan Bermotor  
Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

**Daftar Pertanyaan :**

1. Apakah Saudara pernah menemukan pelanggaran dimensi di saat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat?
2. Apa saja jenis pelanggaran dimensi kendaraan bermotor yang Saudara temukan di saat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat?
3. Apa tindakan Saudara apabila menemukan pelanggaran dimensi di saat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat?

